



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. SAKIR
2. Jabatan : KETUA JURUSAN
3. NHK : 868394

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.070.500.000
------------------------------	------------	----------------------

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA PIDIE, Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 425 m2 di KAB / KOTA PIDIE, Rp. 122.500.000
3. Tanah Seluas 1.250 m2 di KAB / KOTA PIDIE, Rp. 52.000.000
4. Tanah Seluas 2.908 m2 di KAB / KOTA PIDIE, Rp. 175.000.000
5. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA PIDIE, Rp. 77.000.000
6. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA PIDIE, Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 701 m2 di KAB / KOTA PIDIE, Rp. 177.000.000
8. Tanah Seluas 398 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 397.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
---------------------------------------	------------	-------------

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
----------------------------------	------------	-------------

D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
--------------------------	------------	-------------

E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.000.000
------------------------------	------------	-------------------

F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
-------------------------	------------	-------------

Sub Total	Rp.	1.096.500.000
------------------	------------	----------------------

III. HUTANG	Rp.	----
--------------------	------------	-------------

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.096.500.000
--	------------	----------------------

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.